

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Samudera Hindia merupakan lautan dengan luas mencapai 73,3 juta km<sup>3</sup> dan memiliki sumber daya alam yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara dari tiga benua, yaitu Asia, Australia dan Afrika.<sup>1</sup> Dari segi ekonomi, Samudera Hindia menjadi tujuan pasar dengan penduduk mencapai 2,5 milyar lebih,<sup>2</sup> dan jika ditotalkan, negara-negara sepanjang pesisir pantai Samudera Hindia memegang 10% dari *Gross Domestic Product* (GDP)<sup>3</sup> di dunia, dan sekitar 40% perdagangan dunia melewati Samudera Hindia.<sup>4</sup> Selain itu Samudera Hindia juga memiliki sumber daya alam berupa mineral tambang dan gas alam yang melimpah. Negara-negara daerah pesisir Samudera Hindia memiliki lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia, 35% cadangan gas dunia, 60% uranium, 40% emas, 80% penyimpanan permata dan bermacam-macam bahan tambang lainnya.<sup>5</sup> Samudera Hindia juga merupakan jalur internasional utama, dikenal sebagai persimpangan utama dengan letak yang sangat strategis bersangkutan dengan perekonomian, sumber daya alam dan isu lingkungan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Philomene A. Verlaan, "Indian Ocean: Introduction". <http://www.britannica.com/place/Indian-Ocean> (diakses pada 4 November 2015).

<sup>2</sup> Irwandi Rais, "Jelang IORA, Indonesia IOLGF di Kota Padang", (11 September 2015). <http://www.padang.go.id/index.php/informasi-artikel/berita/319-jelang-iora-indonesia-iolgf-di-kota-padang> (diakses pada 26 Februari 2016)

<sup>3</sup> GDP merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun.

<sup>4</sup> Steffen Wippel, "Indian Ocean Rim Cooperation: An Omani Perspective", (Juni 2015) :3.

<sup>5</sup> Future Directions International, "Indian Ocean: A Sea of Uncertainty", (Australia: Future Directions International, 2012): 10.

<sup>6</sup> Stimson, David Michel, Russel Sticklor, eds., "Indian Ocean Rising: Maritim Security and Policy Challenges", (Juli 2012): 11.

Negara-negara di Samudera Hindia dihuni sekitar 2,49 milyar orang, mewakili 35,7% populasi dunia, terhitung pada tahun 2010. Pada tahun 2030, populasi ini diperkirakan akan meningkat hingga 27%, menambah 689 juta orang. Walaupun berbagi lautan yang sama, negara-negara di Samudera Hindia menunjukkan perbedaan yang mencolok satu sama lain, dengan politik, kebudayaan, perekonomian dan lingkungan yang berbeda-beda, contohnya pada Indeks Perkembangan Manusia atau *Human Development Index* yang dirumuskan oleh program pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2011.<sup>7</sup> Dalam hal ini Australia menempati urutan kedua di dunia, sedangkan Mozambique menempati urutan 184.<sup>8</sup>

Hubungan antara negara-negara di Samudera Hindia terjalin karena beberapa faktor seperti ekonomi dan sejarah, melalui nelayan, pelaut, dan pedagang yang berlayar melintasi pelabuhan-pelabuhan dan menciptakan jalur perdagangan. Selain itu, kesamaan sejarah sebagai negara-negara yang pernah berada di bawah imperialisme Eropa secara tidak langsung membentuk identitas bersama. Hubungan antarnegara tersebut kemudian mendorong terjadinya pertemuan-pertemuan regional sejak tahun 1995. Hingga pada akhirnya terbentuk *Indian Ocean Rim Association (IORA)* pada tahun 1997. Dalam perkembangannya, pada tahun-tahun awal berdirinya IORA, pertemuan-pertemuan dilakukan untuk menunjang proses pembangunan struktur dan agenda jangka panjang organisasi.<sup>9</sup>

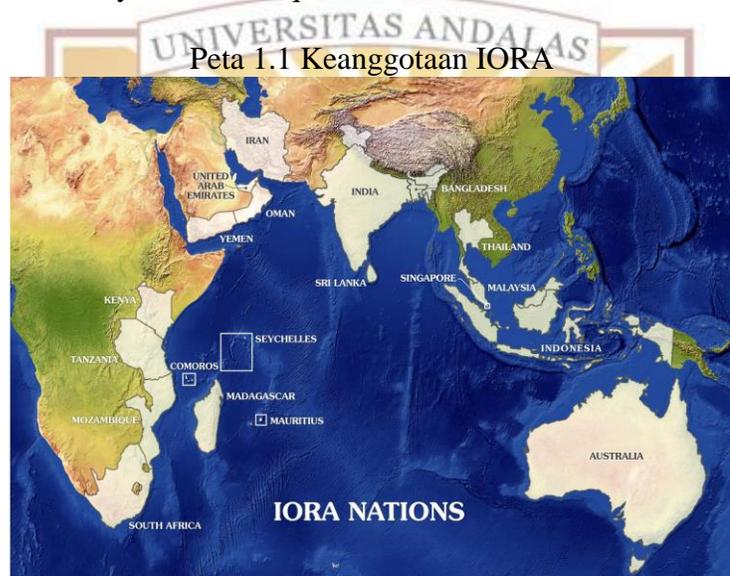
---

<sup>7</sup> Indeks Perkembangan Manusia merupakan ukuran standar pembangunan manusia, dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah dan kemampuan daya beli. (Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006 – 2007", 2007: 3)

<sup>8</sup> Stimson, David Michel, Russel Sticklor, eds., "Indian Ocean Rising: Maritim Security and Policy Challenges", (Juli 2012): 11.

<sup>9</sup> Rizki Roza, "Indian Ocean Rim Association dan Kepentingan Indonesia di Samudera Hindia" *Info Singkat Hubungan Internasional: Vol. VIII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015*, (2015): 5.

IORA merupakan satu-satunya asosiasi yang bersifat lintas kawasan di Samudera Hindia. Pada awalnya IORA bernama IOR-ARC *atau Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* dan kemudian ditukar menjadi IORA pada tahun 2013.<sup>10</sup> IORA beranggotakan 21 negara yang berada di pantai Samudera Hindia di Asia dan Afrika, yaitu Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, Yemen, Iran, United Arab Emirates, Somalia, Seychelles, Mauritius, Madagascar, Comoros, Tanzania, Kenya, Mozambique, dan Afrika Selatan.<sup>11</sup>



Sumber: Paths to Women's Economic Empowerment in IORA (Susan Harris Rimmer, "Path to Women's Economic Empowerment in IORA", ANUedge: 8)

Selain itu, IORA memiliki tujuh negara mitra dialog, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Mesir, Cina dan Jerman. Pada keketuaan India di tahun 2011, diputuskan enam aspek utama IORA, yaitu keamanan maritim, kemudahan investasi dan perdagangan, pengelolaan perikanan, pengelolaan resiko bencana alam, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertukaran kebudayaan dan turisme.<sup>12</sup> Pada Pertemuan

<sup>10</sup> IORA, "background". <http://www.iora.net/charter.aspx> (diakses pada 4 November 2015)

<sup>11</sup> Indian Ocean Rim Association (IOR-ARC): 12th Summit, Gurgaon Communique, Highlights , (2012). <http://mrunal.org/2013/01/diplomacy-indian-ocean-rim-association-ior-arc-12th-summit-gurgaon-communique-highlights.html> (diakses pada 4 November 2015)

<sup>12</sup> IORA, "Charter of the Indian Ocean Rim Association (IORA)", (Perth, Australia, 9 Oktober 2014): 3.

Menteri Luar Negeri atau *Council of Foreign Minister* pertama pada tahun 1997, disepakati bahwa IORA bertujuan untuk liberalisasi perdagangan, serta menetapkan fasilitasi perdagangan, promosi investasi, dan kerja sama ekonomi sebagai fokus aktivitas IORA.<sup>13</sup>

Pada Oktober 2015, Indonesia resmi menerima jabatan sebagai Ketua IORA periode 2015 – 2017<sup>14</sup>, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo berusaha untuk memanfaatkan posisi tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintahan berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik melalui doktrin Poros Maritim. Poros Maritim tersebut disampaikan pertama kali pada tahun 2014 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur, pilar-pilarnya yaitu Indonesia berupaya menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, pengembangan industri perkapalan dan pariwisata maritim, dan pembentukan kerja sama untuk menghilangkan sumber-sumber konflik di laut. Beberapa contoh konflik yang terjadi di antaranya adalah pencurian ikan, sengketa wilayah, penyelundupan senjata dan lainnya. Indonesia juga akan membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Poros maritim

---

<sup>13</sup> Rizki Roza, “Indian Ocean Rim Association dan Kepentingan Indonesia di Samudera Hindia”, *Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VIII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015*, (2015): 6.

<sup>14</sup> Fajar Nugraha, “Indonesia Resmi Menerima Kepemimpinan IORA”, *metrotv news*, 23 Oktober 2015. <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183433/indonesia-resmi-menerima-kepemimpinan-iora> (diakses pada 6 Maret 2016)

tersebut berdampingan dengan enam prioritas utama IORA sehingga sangat menguntungkan bagi Indonesia.<sup>15</sup>

Sebagai langkah konkrit, Indonesia mengusulkan agar Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) IORA yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat, agar dapat mencapai kesepakatan mengenai perumusan IORA *Concord*.<sup>16</sup> Kota Padang terpilih sebagai lokasi diadakannya pertemuan KTT IORA karena beberapa alasan; faktor geografis, di mana Kota Padang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, serta kelengkapan infrastruktur yang dimiliki oleh Kota Padang.<sup>17</sup> KTT IORA berlangsung dari tanggal 20 hingga 23 Oktober 2015. Pertemuan ini merupakan agenda Kementerian Luar Negeri RI yang diadakan di Kota Padang. Pada 23 Oktober 2015, diselenggarakan Padang *Communique* yang menyepakati penguatan kerja sama maritim dan ekonomi, melawan perompakan dan penangkapan ikan ilegal, serta meningkatkan *interest* negara-negara yang tergabung di dalam IORA. Selain itu, Padang *Communique* juga menyambut Somalia sebagai anggota IORA ke-21 dan Jerman sebagai dialog partner ke-7. Pada KTT IORA tersebut, para anggota menyepakati IORA *Maritime Cooperation Declaration*, dengan tema “Penguatan Kerja Sama Maritim di Samudera Hindia yang Damai dan Stabil”, dan keputusan untuk mendirikan *ad hoc committee* untuk IORA *concord* yang akan dikeluarkan pada tahun 2017 bersamaan dengan perayaan 20 tahun IORA.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Rizki Roza, “Indian Ocean Rim Association dan Kepentingan Indonesia di Samudera Hindia”, *Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VIII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015*, (2015): 7.

<sup>16</sup> Yuri O. Thamrin, “Visi IORA Concord”, (30 Juni 2015). <http://iora.kemlu.go.id/news/view/12> (diakses pada 5 November 2015).

<sup>17</sup> Victor Maulana, “Ini Alasan Padang Jadi Tuan Rumah 20 Negara IORA”, *Kompasiana*, 11 Juni 2015. <http://international.sindonews.com/read/1011499/40/ini-alasan-padang-jadi-tuan-rumah-20-negara-iora-1434003756> (diakses pada 27 Februari 2016)

<sup>18</sup> Wataru Suzuki, “Another Regional Forum Finding its Voice”, (24 Oktober 2015), <http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Another-regional-forum-finding-its-voice> (diakses pada 5 November 2015).

Kota Padang merupakan kota terbesar di sepanjang pantai barat Sumatera. Selain itu, Kota Padang juga memiliki pelabuhan dengan aktivitas arus kapal yang cukup tinggi yaitu Pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan pelabuhan tertua di Sumatera. Pelabuhan yang dulunya bernama Pelabuhan Emma ini telah dirintis sejak tahun 1850 dan memiliki aktivitas arus kapal yang cukup tinggi, khususnya dalam kategori impor yang mencapai 5.053.825 unit pada tahun 2011.<sup>19</sup> Saat ini pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah seperti batu bara, semen, minyak sawit dan barang lainnya yang merupakan komoditas unggulan ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan Afrika.<sup>20</sup> Melalui IORA, ketimpangan yang terjadi di wilayah pantai barat Sumatera memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan, melalui kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya yaitu pemerintah daerah Kota Padang yang berupaya menarik perhatian dunia internasional melalui momentum KTT IORA 2015. Menurut walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Kota Padang bisa membangun kerja sama dengan anggota IORA lain dalam bidang penanggulangan bencana, kerja sama dalam bidang perikanan dan gas.<sup>21</sup> Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

Pemerintah Kota Padang memanfaatkan keberlangsungan IORA untuk percepatan pembangunan kawasan dan juga promosi untuk menarik investor. Selain menjadi tuan

---

<sup>19</sup> Port of Teluk Bayur, "Statistik Arus Barang", (2016). <http://www.telukbayurport.co.id/index.php/arus-barang> (diakses pada 8 Februari 2016)

<sup>20</sup> Indonesia Port Company, "Teluk Bayur". <http://www.indonesiaport.co.id/read/teluk-bayur.html> (diakses pada 16 Februari 2016)

<sup>21</sup> "Go Internasional Melalui IORA". <http://www.jpip.or.id/artikelview-465-go-international-melalui-iora.html> (diakses pada 5 November 2015).

<sup>22</sup> Harian Umum Singgalang, "Kota Padang Tarik Dunia Internasional Melalui IORA", *Harian Haluan*, 5 Juni 2015. <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/40842-kota-padang-tarik-dunia-internasional-melalui-iora> (diakses pada 12 Maret 2015)

rumah KTT IORA, Pemerintah Kota Padang juga berinisiatif untuk membentuk *Indonesian – Indian Ocean Local Government Forum (IOLGF)* yang beranggotakan pemerintah daerah dari 70 kabupaten/ kota pada 13 provinsi. Forum tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah yang bersentuhan dengan Samudera Hindia, dan mendirikan pilar pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama IORA.<sup>23</sup> Pertemuan IOLFG yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 9 September 2015 tersebut diketuai langsung oleh Kota Padang.<sup>24</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun seiring dengan perkembangan undang-undang, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyusun suatu panduan bagi pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengenai penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah.<sup>25</sup> Kemudian Undang-Undang No. 24 tahun 2000 juga mengatur pembentukan kerja sama internasional, di mana pemerintah daerah diakui sebagai lembaga pemerintahan yang memenuhi kualifikasi sebagai “lembaga pemrakarsa” untuk membuat perjanjian internasional. Perubahan tersebut membuka akses pemerintah daerah untuk leluasa melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri, tetapi pemerintah daerah hanya bergerak dalam aktivitas diplomatik dalam level *low diplomatic*. *Low diplomatic* menjadi arena pemerintah daerah karena biasanya mencakup bentuk kerja sama mengenai

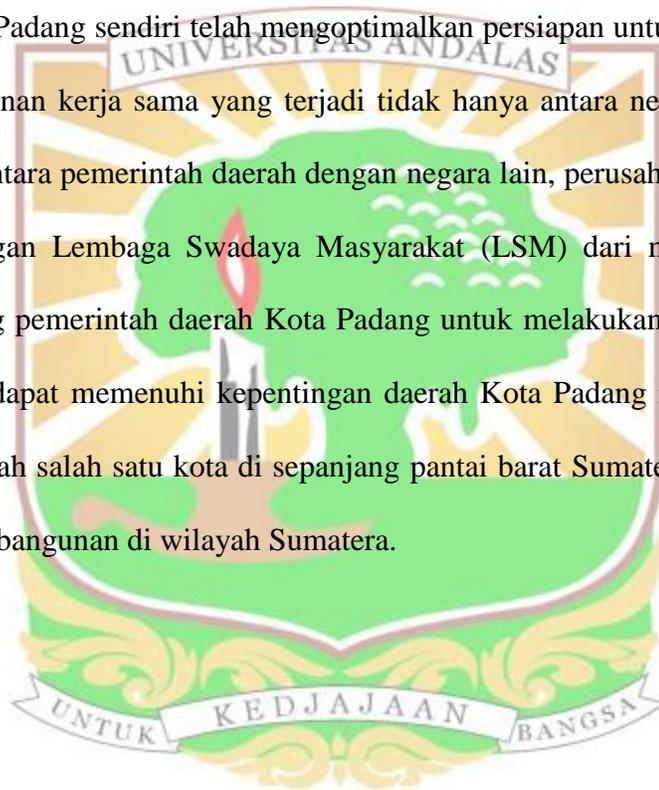
<sup>23</sup> “Walikota di RRI Padang, Warga: Kita Siap Sambut IORA,” *Harian Haluan*, 1 September 2015: 7

<sup>24</sup> IORA News, “Pemko Padang Promosikan IORA 2015 Melalui Trans Padang”, (14 September 2015). <http://iora.kemlu.go.id/news/view/11> (diakses pada 5 November 2015).

<sup>25</sup> Jawahir Thontei, “Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri” *Jurnal Hukum No 2 Vol. 16*, (April 2009): 150.

perkotaan dan kaum urban.<sup>26</sup> Hal ini dapat mendorong tumbuhnya kota-kota menjadi sumber kemakmuran baru di era informasi melalui aktivitas produksi, proses informasi, riset dan kreativitas di wilayahnya.<sup>27</sup>

Penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji karena Kota Padang telah menjadi tuan rumah KTT IORA pada bulan Oktober 2015, sehingga negara-negara anggota IORA dapat melihat secara langsung bagaimana keadaan dan pembangunan Kota Padang. Pemerintah Kota Padang sendiri telah mengoptimalkan persiapan untuk menyambut KTT IORA. Kemungkinan kerja sama yang terjadi tidak hanya antara negara dengan negara lain, melainkan antara pemerintah daerah dengan negara lain, perusahaan dari negara lain atau bahkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari negara lain. Hal ini membuka peluang pemerintah daerah Kota Padang untuk melakukan kerja sama dengan negara lain agar dapat memenuhi kepentingan daerah Kota Padang itu sendiri, di mana Kota Padang adalah salah satu kota di sepanjang pantai barat Sumatera yang mengalami ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera.



---

<sup>26</sup> Nurul Isnaeni, “Peran Strategis Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Global & Strategis Januari – Juni 2013*, (2013): 128.

<sup>27</sup> *Ibid*: 129.

## 1.2. Rumusan Masalah

Kerja sama internasional pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun seiring dengan berkembangnya Ilmu Hubungan Internasional, aktor-aktor yang berperan dalam dunia Hubungan Internasional saat ini tidak lagi hanya negara, namun muncul aktor lain seperti pemerintah daerah yang memiliki kapasitas untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan daerahnya masing masing.<sup>28</sup> Kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Kota Padang dipilih oleh Kementerian Luar Negeri sebagai lokasi pertemuan KTT IORA pada tahun 2015 lalu karena beberapa faktor. Pertama, Kota Padang merupakan kota terbesar di sepanjang pantai barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kedua, Kota Padang memiliki infrastruktur yang mencukupi untuk menyelenggarakan KTT IORA 2015. Kota Padang memiliki peluang yang besar untuk mengoptimalkan potensi daerahnya melalui kerja sama dengan negara-negara anggota IORA. Eksistensi Kota Padang sebagai aktor subnasional yang melakukan hubungan internasional untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang berada di wilayah pantai barat Sumatera yang mengalami ketimpangan pembangunan, melalui kerja sama regional menjadi menarik untuk dibahas.

---

<sup>28</sup> Theodore H. Cohn, Patrick J. Smith, *Subnational Governments as International Actors: Constituent Diplomacy in British Columbia and the Pacific Northwest*, (BC Studies no 110, Summer 1996): 26.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana upaya optimalisasi potensi daerah Kota Padang melalui kerja sama *Indian Ocean Rim Association (IORA)* ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan potensi apa saja yang dimiliki oleh Kota Padang dalam konteks kerja sama IORA.
2. Mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Padang mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama IORA.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pengembangan potensi suatu wilayah oleh pemerintah daerahnya dalam level subnasional melalui asosiasi internasional.
2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional mengenai kerja sama internasional dan pengembangan potensi suatu wilayah melalui asosiasi internasional.
3. Memberi manfaat dan sumbangsih bagi negara, terutama kota-kota di Indonesia agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya dengan memanfaatkan kerja sama internasional.

## 1.6.Studi Pustaka

Penelitian mengenai wilayah subnasional sebelumnya telah banyak dilakukan, dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Salah satunya dibahas dalam salah satu *chapter* dalam buku yang ditulis oleh Alexander S Kuznetsov dengan judul *Theory and Practice of Paradiplomacy*<sup>29</sup>. Kuznetsov menjelaskan peran Provinsi Alberta di Kanada dalam hubungan internasional dengan menggunakan kerangka *explanatory paradiplomacy*. Pengumpulan data digunakan melalui lima sumber utama, yaitu wawancara langsung dengan *Ministry of International and Intergovernmental Relations* (MIIR) Alberta, studi dokumen resmi kinerja MIIR yang tersedia di *website* resmi milik pemerintah, arsip media masa Kanada, diskusi dan wawancara dengan pihak akademis, sumber sekunder dari literatur mengenai *paradiplomacy* di Kanada.<sup>30</sup> *Paradiplomacy* yang dilakukan Provinsi Alberta dilakukan secara independen di dalam arena internasional, juga sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dimiliki Kanada sehingga memberikan kontribusi yang baik.<sup>31</sup> Penelitian *paradiplomacy* Provinsi Alberta ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dengan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan studi dokumen. *Paradiplomacy* tersebut juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).<sup>32</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuznetsov, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan *paradiplomacy*, namun lebih fokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah

---

<sup>29</sup> Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in International Affairs*, (New York: Routledge, 2015)

<sup>30</sup> *Ibid*, 121.

<sup>31</sup> *Ibid*, 148.

<sup>32</sup> *Ibid*, 148.

menggunakan konsep *subnational government* dan dampak upaya tersebut menggunakan konsep daya saing wilayah atau *regional competitiveness*.

Keterlibatan *subnational* dalam level internasional umumnya dilatarbelakangi oleh tujuan ekonomi, salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing wilayah atau *regional competitiveness*, dalam buku berjudul *A Study on the Factors of Regional Competitiveness*<sup>33</sup>, dijelaskan bahwa daya saing dicapai melalui faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, institusional dan kelengkapan publik wilayah itu sendiri.<sup>34</sup> Sedangkan dalam penggunaan konsep daya saing dalam sebuah penelitian, data-data yang harus didapatkan berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan ekonomi. Seperti GDP, tenaga kerja, kualitas hidup dan lainnya.<sup>35</sup> Di dalam buku ini daya saing dipengaruhi oleh beberapa indikator utama seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan faktor lain seperti inovasi dan demografi, sehingga kemudian membantu memberikan data yang menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi daya saing. Daya saing sendiri merupakan bentuk output dari optimalisasi potensi daerah seperti yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian oleh Ronald L. Martin ini dapat menjadi salah satu sumber data sekaligus pembanding untuk output dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian yang berjudul *Faktor Utama dalam Peningkatan Daya Saing Perkotaan*<sup>36</sup>, dijelaskan bahwa daya saing merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan daerah, dikaitkan dengan kemampuan mempertahankan dan meningkatkan

---

<sup>33</sup> Ronald L. Martin, *Study on the Factors of Regional Competitiveness*, (Cambridge: University of Cambridge, 2004)

<sup>34</sup> *Ibid*, 71

<sup>35</sup> *Ibid*, 71

<sup>36</sup> Achmad Ghozali, "*Faktor Utama dalam Peningkatan Daya Saing Perkotaan*", (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2014)

keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia dan kelembagaan atau birokrasi.<sup>37</sup> Infrastruktur terutama infrastruktur transportasi merupakan kunci penggerak produksi, menghubungkan subwilayah, mempermudah distribusi barang yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Faktor sumber daya manusia berperan sebagai pelaku dan obyek pembangunan. Sedangkan faktor kelembagaan atau birokrasi menggambarkan pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam kegiatan ekonomi akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Kualitas pemerintah dan pelayanan publik akan mempengaruhi iklim investasi, juga berperan dalam mendorong spesialisasi berdasarkan potensi daerah. Studi pustaka ketiga ini bertujuan sebagai tambahan data bagi penulis untuk memahami dan menggunakan konsep daya saing, di mana salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya saing yaitu birokrasi atau kelembagaan, dalam penelitian ini birokrasi atau kelembagaan dilihat dari keterlibatan pemerintah daerah atau *subnational government*.

Michael Keating dalam tulisannya yang berjudul *Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies*<sup>38</sup> menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam arena internasional disebabkan oleh perubahan level negara, sistem internasional dan pembangunan ekonomi politik di daerah itu sendiri. Tanggung jawab pembangunan tidak hanya dipikul oleh pemerintah pusat saja namun juga oleh pemerintah daerah. Untuk mencoba memahami paradiplomasi, maka harus dilihat dari sudut pandang daerah itu sendiri. Mengapa suatu daerah ingin melakukan kerja sama internasional? Keating membagi alasannya menjadi tiga, yaitu ekonomi, budaya dan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 5

<sup>38</sup> Michael Keating, *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Government*, (New York: Routledge, 2013).

politik. Dari segi ekonomi, daerah membutuhkan investasi, pasar untuk produk-produknya dan teknologi untuk melakukan modernisasi.<sup>39</sup> Namun hal ini menimbulkan kegelisahan mengenai ketergantungan. Selain itu, daerah juga melakukan kerja sama luar negeri karena alasan kebudayaan, khususnya ketika pemerintah tidak menghargai kebudayaan atau bahasa daerah yang berbeda. Selain itu daerah juga melakukan kerja sama luar negeri dengan alasan politik yang beraneka ragam, seperti mencari pengakuan dan legitimasi yang lebih dari sekedar wilayah saja. Para nasionalis seringkali merasa cemas hal tersebut akan berbalik menjadi upaya pemisahan diri dari negara, seperti yang terjadi di Quebec, Kanada.<sup>40</sup> Tulisan ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana pemerintah pusat harus berhati-hati dalam menangani otonomi daerah, agar daerah tersebut tidak berupaya melakukan pemisahan diri dari pemerintah pusat dan negara, dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemerintah daerah Kota Padang selaku *subnational government* terlibat sekaligus memanfaatkan kerja sama IORA untuk memenuhi kepentingan daerahnya.

Studi pustaka terakhir dalam penelitian ini adalah sebuah artikel di dalam Jurnal Hukum No. 2 vol. 16 dengan judul Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri, studi kasus: Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>41</sup>, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan saling ketergantungan antarnegara menjadi salah satu faktor utama terjadinya globalisasi, sehingga terciptalah suatu dunia tanpa batas yang seolah-olah membentuk suatu *global village* bagi

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 4

<sup>40</sup> *Ibid*, 6

<sup>41</sup> Jawahir Thontei, "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri" *Jurnal Hukum No 2 Vol. 16*, (April 2009).

masyarakat dunia, hal ini kemudian juga memicu perluasan aktor hubungan internasional, salah satunya yaitu pemerintah daerah.<sup>42</sup>

Keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Keterlibatan ini meliputi aspek-aspek seperti penanaman modal, perdagangan luar negeri, turisme atau pariwisata, pendidikan, keuangan hingga pembangunan, namun tidak bersentuhan dengan persoalan seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan tidak bertentangan dengan politik dan kebijakan luar negeri Pemerintah Pusat.<sup>43</sup>

Dalam jurnal ini, kerja sama pemerintah daerah Jawa Barat dengan pihak luar negeri dilakukan dalam bentuk *sister city/province*. Kerja sama tersebut dilakukan dengan pemerintah daerah negara bagian di Australia, sektor utama kerja sama yang akan dilakukan diserahkan kepada Biro Sarana dan Perekonomian. Selain itu pemerintah daerah Jawa Barat juga bekerja sama dengan Provinsi Cholanando Republik Korea, dengan sektor utama kerja sama yang akan dilakukan diserahkan kepada Biro Sarek, kerja sama tersebut menyepakati program bantuan penangkapan ikan sebesar 15 miliar rupiah dari pemerintah daerah Cholanando kepada nelayan di Jawa Barat. Selain kerja sama antara dua pihak pemerintah daerah di negara yang berbeda. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai kerja sama yang melibatkan kelompok swasta asing dengan pemerintah daerah, kemudian kerja sama antara pemerintah daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Asing.<sup>44</sup>

Dalam UU No 24 tahun 2000, dijelaskan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 149 - 150

<sup>43</sup> *Ibid*, 153 - 154

<sup>44</sup> *Ibid*, 160 - 161

memiliki rencana untuk membuat perjanjian internasional, harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri. Hal ini dikarenakan, dalam konteks hubungan luar negeri, pemerintah daerah tidak dapat dipandang sebagai representasi daerahnya sendiri, namun daerah harus dipandang sebagaimana layaknya negara yang merupakan subjek hukum internasional.<sup>45</sup>

Artikel yang ditulis oleh Jawahir Thonetei ini secara menyeluruh lebih membahas mengenai teknis hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tidak menggunakan konsep *paradiplomacy* untuk melihat bentuk kerja sama tersebut, selain itu artikel tersebut menggunakan *sister city* sebagai studi kasus. Di dalam penelitian mengenai IORA ini, artikel tersebut memberikan kontribusi data mengenai kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri, dengan data-data berupa undang-undang dan teknis pelaksanaan hubungan luar negeri. Berbeda dengan studi pustaka yang dijabarkan sebelumnya, penelitian ini tidak melihat *paradiplomacy sister city*, namun lebih fokus pada bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya optimalisasi potensi wilayahnya melalui kerja sama IORA. penelitian ini berkontribusi untuk menjelaskan keterlibatan *subnational government* di Indonesia, seperti menjelaskan landasan hukum yang digunakan oleh Indonesia dan bagaimana batasan-batasan pembentukan hubungan luar negeri oleh pihak pemerintah daerah di Indonesia.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 162

## 1.7. Kerangka Teori dan Konsep

### 1.7.1 Kerja Sama Regional

Kerja sama internasional pada dasarnya muncul karena adanya kebutuhan suatu negara untuk memenuhi dan mencapai kepentingan nasionalnya, namun kemampuan dan potensi yang ada tidak cukup sehingga negara tersebut membutuhkan negara lain untuk mencapai kepentingannya, hingga kemudian muncul kerja sama antara satu negara dengan negara lain atau lebih. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, hubungan antarnegara dipenuhi dengan adanya interdependensi yang kompleks, adanya interdependensi yang tinggi akan membuat negara-negara saling bekerja sama membentuk institusi internasional dengan tujuan untuk menghadapi masalah-masalah bersama, melalui penyediaan informasi dan upaya meminimalisir biaya. Institusi tersebut dapat berupa organisasi internasional formal atau berupa kesepakatan untuk menyelesaikan isu permasalahan dan mencapai kepentingan nasional bersama.<sup>46</sup> Kerja sama internasional juga didorong oleh beberapa faktor,<sup>47</sup> seperti adanya kemajuan teknologi yang memudahkan hubungan antarnegara, kemajuan ekonomi, upaya untuk beraliansi dengan negara lain untuk melindungi dan membela diri, dan kesadaran untuk bernegosiasi dengan tujuan memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut.

Kerja sama internasional memiliki dua syarat utama, pertama saling menghargai kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Hal ini membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang berkesinambungan. Selain itu, tindakan yang dilakukan

---

<sup>46</sup> Robert Jackson, George Sorensen, *“Pengantar Studi Hubungan Internasional”*, (2005):63

<sup>47</sup> Koesnadi Kartasmita, *“Organisasi dan Administrasi Internasional”*, (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997): 19

oleh negara terlibat harus mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati.<sup>48</sup> Kerja sama internasional terbagi menjadi empat bagian, yaitu kerja sama global, regional, fungsional dan ideologi.<sup>49</sup> Kerja sama global merupakan kerja sama yang terjalin antara berbagai negara di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang menyatukan cita-cita bersama. Kemudian kerja sama regional, kerja sama tersebut dilakukan antarnegara yang berdekatan secara geografis. Selain itu, alasan lain melakukan kerja sama adalah kesamaan, pandangan politik, kebudayaan dan sistem produksi ekonomi yang berbeda. Sedangkan kerja sama fungsional merupakan kerja sama yang terjalin setelah sebelumnya melakukan kerja sama di bidang lain. Kemudian kerja sama ideologi, yaitu antara negara-negara dengan ideologi yang sepaham, tanpa batas teritorial.

IORA merupakan bentuk kerja sama regional multilateral, yaitu kerja sama yang cenderung bergantung kepada tindakan dari partisipan yang lebih dari satu. Proses pembuatan keputusan dilakukan bersama, sehingga hasilnya dapat diterima secara luas dalam komunitas internasional.<sup>50</sup> Keanggotaan IORA yang berjumlah 21 negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan telah mencakup negara maju seperti Singapura dan Uni Emirat Arab, dan negara berkembang seperti Indonesia. IORA memiliki 21 anggota, ketua, wakil ketua, kemudian sekretariatnya terdiri atas dua direktur, diketuai oleh sekretaris jenderal, dan staf lainnya. Selain itu, IORA juga didukung oleh tujuh partner dialog dan dua observer.

Kerja sama multilateral selalu memiliki dua sisi, bagi negara kecil, kerja sama multilateral adalah hal yang baik, karena menempatkan negara tersebut di sebuah meja

---

<sup>48</sup> K. J Holsti, *“International Politics: A Framework for Analysis”*, (1992): 10.

<sup>49</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Relations Dictionary* 3rd edition, (Santa Barbara: Western Michigan University, 1992): 281

<sup>50</sup> Charles Doran, *“International Cooperation: The extents and Limits of Multilateralism”*, (Cambridge: Cambridge University Press 2010):40

yang sama dengan negara besar, keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, namun di sisi lain multilateralisme merupakan beban bagi negara kecil, karena keterlibatan tugas dan mandat untuk memenuhi peran kebijakan politik yang telah disepakati.<sup>51</sup>

### **1.7.2 Subnational Government**

Ilmu Hubungan Internasional menjelaskan berbagai aktor yang berperan dalam arena internasional. Teori-teori *mainstream* secara umum menjelaskan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, negara yang diwakilkan oleh pemerintah pusatnya bertanggung jawab dalam urusan luar negeri, mengesampingkan aktor lain seperti pemerintah daerah atau *subnational government* (SNG).<sup>52</sup> Ada beberapa faktor pendukung yang menjelaskan bagaimana SNG kemudian mendapatkan tempatnya di dunia hubungan internasional, pertama yaitu berkembangnya aktor dalam hubungan internasional sebagai efek globalisasi. Kedua, walaupun peran SNG menjadi semakin signifikan, namun tidak dicap sebagai perkembangan yang hanya menarik perhatian media saja.<sup>53</sup>

SNG diidentifikasi sebagai aktor dalam hubungan internasional, di mana aktor tersebut muncul karena kompleksnya aktivitas dalam hubungan internasional yang tidak mampu direspon secara efektif oleh pemerintah pusat. SNG berperan sebagai aktor yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan komunitas. SNG memiliki dua peran

---

<sup>51</sup> *Ibid*:43

<sup>52</sup> Purnendra Jain, "Japan's Subnational Governments in International Affairs", (USA: Routledge, 2005):

13

<sup>53</sup> *Ibid*:14

ketika berhubungan dengan dunia internasional, pertama dalam bidang ekonomi, di mana SNG dapat melakukan tiga tindakan, yaitu<sup>54</sup>:

1. Membangun jaringan luar negeri untuk mengejar pengaturan komersial yang akan meningkatkan iklim ekonomi wilayah, seperti pekerjaan, teknologi dan operasi komersial lainnya. Bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi wilayah dan mengelola anggaran daerah dengan bijaksana.
2. Menggiatkan jaringan ekonomi internasional yang ada disekitar lingkungan SNG dengan membuka daerahnya melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas komersial.
3. Melakukan insentif keuangan melalui paket rangsangan, menghilangkan pajak dan umpan keuangan lainnya, kemudian melakukan kerja sama bilateral atau kelompok regional multilateral untuk membangun aliansi.

Kedua dalam bidang politik, SNG dapat menjalin kerja sama *sister city* yang dirancang untuk mempromosikan pemahaman bersama melalui pertukaran budaya dan edukasi, seperti pertukaran pendidikan, kunjungan kerja, perayaan budaya, pencapaian kepentingan bersama, pertukaran misi perdagangan dan bantuan kebencanaan.<sup>55</sup>

Kapasitas SNG untuk berhubungan langsung dengan masyarakat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di daerah yang dikelola oleh SNG, jika dibandingkan dengan pemerintah pusat. Masing-masing SNG memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengelola daerahnya, begitupula penerapan SNG di masing-masing negara, bergantung pada ideologi dan sistem yang digunakan oleh negara tersebut. Menurut James Rosenau, kedaulatan suatu negara tidak hanya dimiliki oleh pemerintah

---

<sup>54</sup> *Ibid*:21 - 25

<sup>55</sup> *Ibid*, 27-30

nasional, namun juga milik daerah, karena SNG merupakan *sovereignty-free actor* yang memiliki kapasitas untuk berinteraksi langsung dengan aktor-aktor internasional.<sup>56</sup>

SNG memiliki dua kapasitas utama, pertama SNG sebagai *primary actor*, di mana SNG berperan dalam hubungan global secara langsung, baik dalam aliran hubungan dari dalam ke luar, dari luar ke dalam, atau secara bersamaan. Interaksi yang dilakukan oleh SNG dapat menyebabkan pembentukan kebijakan atau agenda publik. Kedua yaitu, SNG sebagai *mediating actor*, ketika SNG mempengaruhi pemerintah pusat untuk membuat suatu kebijakan umum yang bermanfaat bagi kondisi daerah, contohnya pada area perdagangan dan investasi luar negeri.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, pemerintah daerah Kota Padang, yaitu wilayah yang berada di bawah pemerintah pusat, dengan sistem *self-government*, memiliki otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pada dasarnya peran pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola kerja sama internasional telah memiliki landasan formal, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, berisikan kerangka hukum mengenai aktivitas kerja sama internasional bagi pemerintah daerah yang relevan bagi pembangunan daerah.<sup>58</sup> Menurut Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah<sup>59</sup>, bentuk kerja sama luar negeri yang memungkinkan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah, pertama kerja sama ekonomi, meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu

---

<sup>56</sup> Theodore H.Cohn dan Patrick J.Smith, "Subnational Governments as International Actors Constituent Diplomacy", *British Columbia and the Pasific Northwest*: 30-31

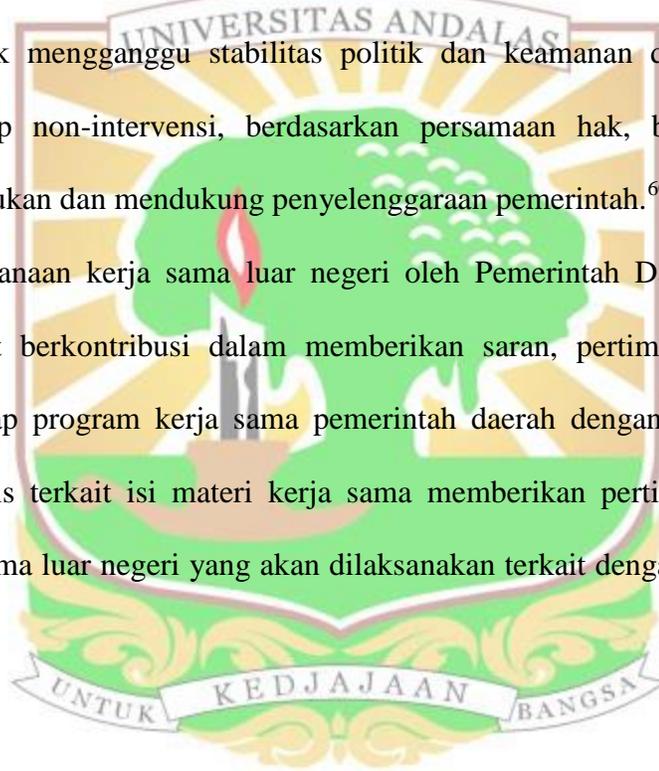
<sup>57</sup> Ibid, 26-28

<sup>58</sup> Nurul Isnaeni, "Peran Strategis Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Global & Strategis* Januari – Juni 2013, (2013): 130.

<sup>59</sup> Departemen Luar Negeri, "Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah", (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003): 16.

pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup dan perhubungan, kedua yaitu kerja sama sosial budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olahraga dan kesenian, dan yang ketiga dikategorikan dalam bentuk kerja sama lain. Selain itu, kerja sama luar negeri yang dilakukan juga harus memenuhi syarat - syarat tertentu, yaitu harus dilaksanakan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dan dalam kerangka negara kesatuan, lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki persetujuan dari DPRD, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, tidak melanggar prinsip non-intervensi, berdasarkan persamaan hak, berdasarkan prinsip persamaan kedudukan dan mendukung penyelenggaraan pemerintah.<sup>60</sup>

Dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri ikut berkontribusi dalam memberikan saran, pertimbangan politis dan yurisdiksi terhadap program kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Departemen teknis terkait isi materi kerja sama memberikan pertimbangan mengenai substansi kerja sama luar negeri yang akan dilaksanakan terkait dengan hubungan politik suatu daerah.<sup>61</sup>



---

<sup>60</sup> *Ibid*, 17.

<sup>61</sup> "Peluang Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Menjalin Kerja sama dengan Kota Geylang Serang, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam di Singapura". <http://thesis.umy.ac.id/datapublik>t16251> (diakses pada 12 Februari 2016)

### 1.7.3 Daya saing wilayah

Daya saing wilayah atau *regional competitiveness* merupakan konsep yang mengkaji wilayah di negara dan lokal, dan *subnational*.<sup>62</sup> Daya saing *subnational* dapat dilihat dari pengembangan ekonomi melalui otonomi daerahnya. Daya saing pada umumnya digunakan untuk mengukur kesuksesan suatu perusahaan, setelah perusahaan tersebut merespon kebutuhan pasar dengan benar. Daya saing muncul dengan konsep '*survival of the fittest*', yaitu aktor yang terkuatlah yang mampu tetap bertahan dan memenangkan dinamika kompetisi dunia perekonomian. Pada dasarnya daya saing merujuk pada kemampuan untuk bersaing, tumbuh dan memiliki keuntungan dalam pasar. Namun berbeda dengan perusahaan yang dapat keluar masuk pasar, wilayah atau kota seringkali terkunci di dalam kompleksitas interdependensi, selain itu wilayah atau kota tidak hanya fokus pada satu tujuan saja, sehingga tidak dapat begitu saja mengejar kesuksesan atau keuntungan ekonomi. Wilayah atau kota juga tidak memiliki kontrol langsung terhadap seluruh aset, hal ini menyebabkan respon yang lambat pada perubahan performa ekonomi pasar.<sup>63</sup>

Indikator daya saing wilayah menurut *United Kingdom Department of Trade and Industries* terbagi menjadi lima bagian<sup>64</sup>, yaitu:

1. Keseluruhan daya saing, seperti GDP per kepala, pendapatan rumah tangga, produktivitas tenaga kerja, mutu pendapatan, dan ekspor,
2. Pasar tenaga kerja,
3. Edukasi dan pelatihan,

<sup>62</sup> Gillian Bristow, "*Critical Reflection on Regional Competitiveness*", (New York: Routledge, 2010):6

<sup>63</sup> *Ibid*, 14-15

<sup>64</sup> Ronald L. Martin, "A Study on the Factors of Regional Competitiveness", (Cambridge: University of Cambridge, 2004):225

4. Modal,
5. Infrastruktur.

Dalam sektor perekonomian, daya saing wilayah kemudian dipahami dalam tiga konsep dasar. Pertama, wilayah merupakan tempat yang dapat mengekspor barang-barang khusus. Kedua, wilayah merupakan sumber peningkatan keuntungan. Ketiga, wilayah merupakan pusat pengetahuan, sebagai elemen sosiologi dan merupakan industri geografi.<sup>65</sup>

Menurut konsep kota berkelanjutan dari *World Bank Institute*,<sup>66</sup> daya saing daerah dapat dilihat dari tiga variabel utama, yaitu perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Variabel-variabel tersebut kemudian dikembangkan menjadi subvariabel sebagai indikator, antara lain yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita, dan laju pertumbuhan produktivitas. Kemudian modal alamiah seperti ketersediaan dan kualitas sumber daya sebagai subvariabel infrastruktur dan sumber daya alam. Terakhir yaitu, indeks pembangunan manusia sebagai subvariabel sumber daya manusia.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini, konsep daya saing yang akan digunakan adalah konsep daya saing menurut *World Bank Institute*.

Pemerintah dan sektor privat bekerja sama untuk meningkatkan daya saing wilayah, di mana pemerintah akan berperan sebagai fasilitator, sektor privat berperan dalam meningkatkan daya saing industri, dan kemudian memicu pembentukan ekonomi melalui

---

<sup>65</sup> *Ibid*, 215

<sup>66</sup> World Bank Institute, “*Sustainable City*”, (World Bank Institute, 2002).

<sup>67</sup> Ira Irawati, “Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara”. (Universitas Diponegoro, Bandung, 2012)

kerja sama sektor publik dan sektor privat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan peluang kerja, hingga kemudian mengurangi kemiskinan.<sup>68</sup>

## 1.8. Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sekelompok orang atau sejumlah individu sebagai asal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan.<sup>69</sup> Proses penelitian tersebut melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data secara spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan.<sup>70</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis akan mencoba menggambarkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi *subnation state* dalam IORA dengan studi kasusnya yaitu Kota Padang, sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan IORA pada Oktober 2015. Penggunaan metode ini bertujuan untuk dapat menggambarkan secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>68</sup> KyeongAe Choe and Brian Roberts, "Competitive Cities in the 21<sup>st</sup> century", (Phillipines: Asian Development Bank, 2011):3

<sup>69</sup> John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition," (California, SAGE Publications, 2013): 4.

<sup>70</sup> *Ibid*, 4-5.

### 1.8.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam ruang lingkup pemerintahan daerah Kota Padang, sebagai institusi yang bertanggung jawab menentukan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan politik yang berhubungan dengan pelaksanaan IORA guna mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kota Padang. Batasan penelitian ini adalah dari sebelum terpilihnya Kota Padang sebagai tuan rumah KTT IORA yaitu tahun 2014, hingga setelah diadakannya KTT IORA yaitu tahun 2015. Batasan masalah tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti memperoleh data yang valid.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan obyek yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, obyek yang akan dijelaskan adalah Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai *subnational government*. Sedangkan unit eksplanasi, yaitu obyek yang mempengaruhi unit analisis dalam penelitian ini adalah *Indian Ocean Rim Association (IORA)* sebagai organisasi kerja sama regional. Joshua Goldstein menjelaskan level analisis menjadi empat bagian.<sup>71</sup> Pertama yaitu level individu, berfokus pada penelaahan sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan. Kedua, level domestik yaitu level yang menjelaskan pengaruh sekelompok orang di dalam negara terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh negara, seperti organisasi politik, kelompok kepentingan atau lembaga-lembaga negara. Ketiga level antarnegara, di mana perhatian diberikan pada pengaruh suatu negara terhadap

---

<sup>71</sup> Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, “*International Relations Tenth Edition*”, (United States of America: Pearson Education Limited, 2014): 171 – 173

aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Level terakhir yaitu level global, menjelaskan bagaimana pengaruh sistem internasional dalam level global. Dalam penelitian ini, level analisis yang akan digunakan yaitu level domestik, di mana penelitian akan difokuskan pada perilaku lembaga-lembaga negara, yaitu pemerintah daerah Kota Padang.

#### 1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian dapat digolongkan menjadi dua bagian<sup>72</sup>, yaitu:

##### 1) Data primer dari wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti dengan pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu selain membuat *draft* pertanyaan utama, adanya pertanyaan lain yang akan muncul yang berkembang dari pertanyaan utama. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, tanpa adanya wawancara peneliti akan kehilangan informasi-informasi penting, karena melalui wawancara peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk berbicara dan bercerita mengenai hal yang ingin peneliti cari.<sup>73</sup> Perencanaan wawancara dilakukan melalui beberapa tahapan<sup>74</sup>, salah satunya yaitu menentukan responden atau informan dengan menggunakan *purposive sampling*. *Sampling* dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh satuan *sampling* yang memiliki karakteristik

---

<sup>72</sup> Bagong Suyanto, “*Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005): 55.

<sup>73</sup> *Ibid*, 49.

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011): 199

yang dikehendaki,<sup>75</sup> yaitu orang-orang yang memiliki peran, yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini orang-orang yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan yang akan diwawancarai

No	Nama Informan	Jabatan
1	Drs. Muhidi MM	Ketua Umum DPRD Fraksi PKS Kota Padang
2	Drs. Erwin M, MA	Sekretaris BPMPTSP Kota Padang
3	Prof. Dr. Ir. Helmi M.Sc	Perwakilan <i>University Network</i> Samudera Hindia
4	Dr. Ir. John Nurifdinsyah, M.S	Tim Forum Akademik Samudera Hindia (FASH)

2) Data sekunder dari teks atau arsip yang teruji keabsahannya

Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena telah tersedia, seperti di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, kantor pemerintahan hingga melalui media online. Data yang dikumpulkan berupa teks atau gambar, hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari kata untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti yang mendukung penelitian.<sup>76</sup> Peneliti akan menganalisis data sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya agar tidak mengurangi makna dan pengertian dari data tersebut hingga kemudian menjadi bentuk data primer dan sekunder.

<sup>75</sup> Nugraha Setiawan, “*Diklat Metodologi Penelitian Sosial: Teknik Sampling*”, (Bogor: Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal, 2005): 3

<sup>76</sup> Bagong Suyanto, “*Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005): 55.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek aspek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>77</sup> Menurut Miles dan Huberman,<sup>78</sup> teknik analisis data dilakukan dalam empat tahap, yaitu pertama pengumpulan data, dalam penelitian pengumpulan data terbagi menjadi data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan data sekunder dari studi dokumen, kemudian reduksi data, memilah data yang berkaitan dengan penelitian, merangkum dan memfokuskan data yang diperoleh, ketiga yaitu penyajian data, yaitu mengolah data setengah jadi dalam bentuk tulisan dan memiliki alur tema yang jelas. Terakhir yaitu kesimpulan, yaitu tahapan akhir yang menjurus pada jawaban untuk pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, di mana IORA akan dijelaskan menggunakan konsep kerja sama internasional, peran pemerintah daerah Kota Padang akan dijelaskan menggunakan konsep *subnational government*, dan konsep daya saing wilayah atau *regional competitiveness* akan digunakan sebagai tolak ukur dampak optimalisasi potensi daerah Kota Padang, di mana daya saing dapat dicapai melalui beberapa faktor, seperti infrastruktur, GDP, tenaga kerja dan lainnya. Analisis data kemudian akan dimulai dengan mengidentifikasi potensi apa saja yang dimiliki oleh Kota Padang, lalu melihat upaya optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti upaya peningkatan standar hidup, peningkatan ekonomi melalui investasi dan

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008): 50.

<sup>78</sup> Emzir, “*Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011):129-133

kerja sama dengan pihak asing negara anggota IORA lainnya, dan kemudian menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut pada daya saing Kota Padang.

## **1.9.Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan.**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Penjelasan tentang *Indian Ocean Rim Association* (IORA).**

Penjelasan tersebut terkait latar belakang terbentuknya IORA, sejarah pembentukan IORA, struktur organisasi dan hal-hal terkait, dalam bab ini IORA kemudian akan dijelaskan menggunakan konsep kerja sama internasional.

### **Pada BAB III: Penjelasan tentang Kota Padang.**

Dalam Bab ini, Kota Padang akan dijelaskan dengan menggunakan konsep *subnational government* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penjelasan tersebut meliputi pemerintah daerah, potensi wilayah, bagaimana upaya pemerintah daerah tersebut sebagai aktor subnasional dan hal-hal terkait lainnya.

### **BAB IV : Analisis Mengenai Optimalisasi Pemerintah Daerah Kota Padang.**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana upaya optimalisasi potensi daerah Kota Padang melalui kerja sama IORA, dilihat dari kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dan telah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Padang. Upaya tersebut akan dianalisis menggunakan konsep daya saing atau *regional competitiveness*.

### **Pada BAB V : Penutup.**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.